

10

Konflik, Ketidakadilan, dan Perbedaan Identitas

Faturochman

Pengantar

Konflik dan kekerasan menjadi fenomena yang sangat sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan juga di masa lalu. Dapat diprediksikan bahwa konflik ini akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Karena di dalam konflik banyak sekali permasalahan yang terlibat dan muncul akibat-akibat lain darinya, maka kesuraman akan bertambah menyelimuti kehidupan di Indonesia bila konflik itu tidak segera dipecahkan. Namun harus diakui bahwa menyelesaikan konflik bukanlah persoalan yang mudah. Persoalan lainnya, bila tidak ada upaya ke arah sana, maka kehancuran masyarakat dan bangsa Indonesia bisa benar-benar terjadi.

Sesungguhnya, konflik tidak hanya memiliki sisi negatif. Pada tingkat perselisihan yang tidak melibatkan kekerasan, konflik bisa menjadi pemicu terbentuknya tatanan yang lebih harmonis. Penyelesaian konflik melalui jalur nonkekerasan telah terbukti mendewasakan bangsa-bangsa yang telah maju. Namun tulisan ini memfokuskan pada konflik yang melibatkan kekerasan, khususnya

kekerasan fisik, sehingga sisi negatifnya lebih menonjol, bahkan mendominasi paparan dalam tulisan ini. Berangkat dari fakta-fakta yang terekam, tulisan ini mencoba mengkajinya berdasarkan konsep-konsep yang ada. Secara lebih spesifik lagi, kerangka analisis dalam tulisan ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori psikologi sosial.

Sekilas Fakta

Secara konseptual, kekerasan dan konflik merupakan dua hal yang berbeda. Kekerasan merupakan perilaku yang mengarah pada perusakan, menyakiti, atau membunuh. Dalam pengertian ini, kekerasan lebih menekankan pada perilaku dan akibatnya. Sementara itu, konflik selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan berbeda dan perbedaan tersebut menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengertian ini, konflik internal atau konflik psikologis dalam diri individu tidak termasuk kategori yang dimaksud, namun implikasi dari konflik internal ini banyak terkait dengan konflik seperti yang didefinisikan tadi.

Apakah konflik meningkat setelah era Orde Baru? Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa konflik bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Benar, dalam catatan sejarah konflik kekerasan ini ada sebelum masa pendudukan atau penjajahan. Tercatat pada waktu itu banyak kekerasan terjadi di Jawa dan Sulawesi serta menjadi bagian kehidupan pada kelompok Madura, Dayak, Aceh, dan beberapa yang lain juga (Colombijn dan Linbald, 2002). Wilayah-wilayah itu belum didefinisikan sebagai Indonesia seperti sekarang. Pada masa penjajahan, konflik kekerasan menjadi bagian dari

kehidupan sehari-hari. Ketika VOC masuk dan menghendaki monopoli perdagangan, kekerasan terjadi di beberapa tempat, seperti Malaka, Banten, dan Makassar. Selama periode pendudukan oleh Belanda, tidak kurang dari 32 perang antara Belanda dengan Hindia-Belanda tercatat secara resmi dalam dokumen negara Belanda (Nordholt, 2002). Pada masa pendudukan Inggris dan Jepang, konflik antara penjajah dan yang dijajah memang lebih sedikit dalam arti jumlah konflik. Namun harus dicatat bahwa pada periode itu, tidak sedikit nyawa yang melayang akibat kekerasan dan perlakuan yang melampaui batas kemanusiaan.

Pada awal masa kemerdekaan, kembali terjadi konflik antara Indonesia yang telah memiliki identitas baru dengan Belanda yang ingin kembali menjajah. Setelah Konferensi Meja Bundar dan Indonesia menjadi negara berdaulat penuh, konflik terjadi lagi. Kali ini antara RI dengan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, di antaranya, adalah Kahar Muzakar, DI/TII, dan RMS. Puncak dari konflik pada masa pemerintahan Sukarno adalah yang disebut dengan gerakan G 30 S/PKI.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, konflik terbuka tampak surut karena sikap dan tindakan represif penguasa pada waktu itu. Setidaknya tiga konflik besar dan berlangsung cukup lama pada periode ini, yaitu masalah Timor Timur, GAM, dan GPM. Catatan tentang konflik dan kekerasan justru bertambah dengan konflik berskala lebih kecil, seperti tawuran antarsekolah, permukiman, atau antarkampung (Faturochman, 1993b). Konflik perburuhan (Faturochman, 1995; 1998; 1999c) dan konflik pertanahan (Faturochman, 2002a) juga menonjol dalam era ini. Di akhir masa Orde Baru hingga sekarang, konflik bertambah lagi ketika konflik-konflik yang lama belum terselesaikan. Pertikaian brutal muncul

antara Islam-Kristen di Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi Tengah), Dayak-Madura-Melayu di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Munculnya partai-partai baru juga meramaikan konflik yang sudah ada. Dengan kata lain, konflik makin bervariasi dalam hal bentuk dan skalanya.

Penelitian tentang tata pemerintahan dan otonomi daerah (Dwiyanto, dkk., 2003) menemukan tiga bentuk konflik yang berkembang dalam era otonomi di daerah. Konflik-konflik yang dimaksud adalah konflik sosial, politik, dan ekonomi. Kekerasan antarwarga yang makin banyak terjadi wilayah-wilayah administrasi yang kecil adalah contoh konflik sosial. Persoalan politik yang mengarah pada konflik terjadi antarkepala daerah, antarinstansi, dan antarpendukung parpol, sedangkan persoalan sengketa tanah, perselisihan pengelolaan sumber daya alam, dan konflik perburuhan tergolong konflik ekonomi. Dari identifikasi tersebut, tidak semuanya tergolong konflik yang disertai kekerasan. Kekerasan antarwarga, konflik antarpendukung parpol, sengketa tanah, dan konflik perburuhan banyak diwarnai dengan kekerasan. Konflik perebutan sumber daya pada beberapa kelompok masyarakat juga terbukti banyak yang disertai kekerasan.

Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa konflik merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Beberapa konflik yang melibatkan kelompok pemimpin ada yang melibatkan kekerasan dan ada yang tidak. Meskipun demikian, konflik-konflik elite masyarakat merupakan eskalator dari konflik-konflik kekerasan di tingkat bawah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pemimpin partai pada mulanya sering menunjukkan konflik di antara mereka. Hal tersebut direspons di lapisan bawah secara langsung dalam bentuk kekerasan antaranggota partai yang berbeda. Ketika konflik di lapisan atas surut,

sebaliknya, di lapisan bawah tidak demikian jadinya. Sekali konflik meletup, sulit menghentikannya.

Persoalan yang paling mengerikan dalam konflik-konflik kekerasan adalah banyaknya korban. Darah yang tumpah dalam berbagai peristiwa itu terlalu banyak. Banyaknya nyawa yang melayang juga terasa sia-sia. Belum lagi korban harta dan fasilitas publik yang hilang dan rusak tidak terhitung jumlahnya. Tidak kalah pentingnya adalah hilangnya kekayaan nonmaterial, seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan serta relasi sosial yang makin tidak jelas bentuknya.

Perebutan Sumber Daya dan Kekuasaan

Data-data menunjukkan bahwa penguasaan atas sumber daya oleh sebagian kelompok dan ketika kelompok lain juga ingin menguasainya menjadi faktor penting hingga terjadinya konflik. Hal ini terjadi pada semua tingkat: individu, kelompok, komunitas, hingga negara. Bila dicermati lebih jauh, maka persoalannya bukan pada perebutan sumber dayanya sebab persoalan ini terjadi ketika tidak ada tatanan kehidupan, yaitu pada zaman hukum rimba berlaku. Dari sejarah, bahkan tercatat bahwa dalam masyarakat yang sangat tradisional sekalipun, ada nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk hidup bersama dan hal itu mencegah terjadinya konflik maupun sebagai sistem pemecahan konflik. Oleh karena itu, sekali lagi, persoalan tata kehidupan yang di antaranya mengatur pembagian sumber daya inilah yang semestinya menjadi sorotan.

Tata kehidupan yang dimaksud bukan sesuatu yang statis. Pada waktu yang bersamaan, ada banyak perbedaan yang melandasi

masing-masing tatanan. Karenanya, suatu masyarakat mempunyai banyak tatanan yang berbeda-beda, apalagi antara satu masyarakat dengan lainnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tidak mungkin tidak ada kesamaan yang dapat digunakan untuk mengatur perbedaan-perbedaan itu. Di sinilah pentingnya prinsip keadilan diterapkan.

Prinsip keadilan merupakan bagian terpenting dalam mengatur kehidupan bersama. Di dalam sebuah kelompok, individu-individu berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya dan mengedepankan kepentingannya (Greenberg, 1996; van Den Bos, 1996). Orientasi diri yang menonjol ini tidak dibenarkan dalam kehidupan bersama sehingga dibuatlah tatanan untuk mengaturnya. Di sini, prinsip keadilan dibutuhkan sehingga dalam sebuah kelompok dapat diciptakan relasi-relasi yang adil, saling menguntungkan, dan saling menghormati (Faturochman, 2002b). Hal yang sama diperlukan dalam tatanan kehidupan antarkelompok atau dalam skala kehidupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat diterapkan secara umum.

Prinsip keadilan yang pertama, sering disebut sebagai keadilan substantif, mengatur pembagian sumber daya, keuntungan, dan kekuasaan. Distribusi atas ketiganya diatur berdasarkan nilai-nilai yang dianut dan tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam memformulasikan keadilan distribusi ini, sering kali terjadi konflik dalam arti perselisihan. Namun, proses ini harus berjalan dan konflik seperti ini pada umumnya dapat diselesaikan, bahkan jalan keluar yang dirumuskan bersama merupakan pegangan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan selanjutnya. Dengan demikian, konflik yang terjadi bersifat fungsional.

Tidak mudah untuk mewujudkan kaidah keadilan distributif yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menjadi pegangan dalam penyelesaian konflik. Diperlukan adanya prosedur-prosedur yang juga adil. Dengan kata lain, prinsip keadilan kedua, yaitu keadilan prosedural, juga harus dirumuskan. Prinsip keadilan prosedural sangat dekat dengan prinsip *good governance* yang akhir-akhir ini banyak didengungkan. Prosedur yang adil terwujud bila di dalamnya ada partisipasi/representasi berbagai pihak, transparansi dan akurasi informasi, akuntabilitas dan tidak bias, kompetensi dan konsistensi, serta etis. Prosedur yang demikianlah yang akan mencegah konflik kekerasan dan bila terjadi konflik, maka dapat diarahkan pada konflik yang fungsional.

Persoalan keadilan dan ketidakadilan tidak selamanya dapat dilihat secara objektif apalagi absolut. Sistem yang dibuat untuk menegakkan keadilan selalu diwarnai oleh interpretasi dan penilaian subjektif. Keadilan bagi satu kelompok dapat berarti ketidakadilan bagi kelompok lain. Dalam menilai keadilan, orang sering tidak berlandaskan pada sistem atau kriteria yang disepakati, tetapi sering berdasarkan pada hasil perbandingan. Penilaian ketidakadilan oleh satu orang atau kelompok masyarakat ketika membandingkannya dengan kelompok lain merupakan bagian dari deprivasi relatif. Di sini, satu kelompok tidak dapat menggapai apa yang didapatkan oleh kelompok lain meskipun kedua kelompok mempunyai kemampuan dan hak yang sama (Faturachman, 1998). Kegagalan ini mengarah pada penilaian adanya ketidakadilan.

Kesadaran akan adanya ketidakadilan yang berkaitan dengan deprivasi relatif muncul pada kelompok-kelompok yang cukup kritis memandang kehidupan. Mereka adalah kelompok yang memiliki

latar belakang pendidikan cukup tinggi, berpenghasilan cukup, atau kelompok menengah ke bawah yang mendapatkan advokasi dari aktivis, seperti buruh dan petani. Bangkitnya kelompok-kelompok ini menggeser bentuk-bentuk konflik dalam beberapa tahun terakhir. Tanda-tanda yang paling jelas dari fenomena ini adalah protes kolektif dalam bentuk demo dan petisi. Pada dasarnya, mereka menuntut adanya keadilan, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.

Besar-kecilnya konflik kekerasan yang berlatar belakang deprivasi relatif tergantung pada besar-kecilnya kesenjangan dalam masyarakat. Makin senjang jarak kelompok, dalam arti ekonomi atau politik, berarti makin *deprived* pihak yang berada di bawah. Saat ini, tidak hanya semakin banyak jumlah orang dan kelompok yang mengalami deprivasi relatif, tetapi juga mereka yang mengalami deprivasi ganda. Mereka adalah orang-orang dan kelompok yang secara absolut dan relatif mengalami deprivasi. Contohnya adalah petani dan buruh miskin yang bermitra dengan konglomerat atau perusahaan milik negara (Faturachman, 1998; 1999c; Faturachman & Walgito, 2003). Kemitraan tersebut menghasilkan banyak keuntungan, tetapi mereka tetap miskin, sementara para konglomerat dan pejabat semakin kaya. Dalam melakukan protes, mereka bisa semakin keras dan destruktif karena merasa tidak ada lagi yang dipertaruhkan. Mereka merasa berhak menikmati sumber daya dan keuntungan, tetapi ternyata tidak bisa mendapatkannya. Secara objektif dan secara relatif, mereka dalam kondisi miskin dan harapan menjadi mustahil diwujudkan sehingga protes dengan intensitas yang lebih besar menjadi satu-satunya jalan yang dianggap dapat menyelesaikan masalah. Risiko dianggap tidak ada karena bila gagal berarti nasibnya tetap, dari miskin menjadi miskin.

Favoritisme vs Derogasi

Persoalan keadilan memang menjadi kunci persoalan dalam memahami dan memecahkan konflik. Namun, keadilan menjadi satu utopia: mudah diucapkan, sebagian besar orang menginginkannya, dan ternyata sangat sulit diwujudkan. Memperjuangkan keadilan merupakan gerakan tanpa akhir dan sebagian orang yang memperjuangkannya sering merasa lelah dan frustrasi. Padahal, dua prinsip keadilan yang disebutkan terdahulu bukanlah format keadilan yang lengkap. Setidaknya masih ada satu prinsip keadilan lagi yang harus ditegakkan untuk menciptakan sistem yang adil, yaitu keadilan dalam relasional. Relasi dapat dikatakan adil bila setidaknya didasari oleh penghargaan terhadap sesama, kepercayaan (*trust*), dan netral.

Realitas menunjukkan bahwa dasar-dasar relasi yang adil itu tidak terwujud. Ketidakadilan terus terjadi karena dalam mengembangkan relasi sosial banyak didasari oleh prasangka atau sikap negatif. Memandang negatif pihak lain dan berprasangka menyebabkan orang atau masyarakat tidak bisa berbuat adil. Lebih dari itu, sikap negatif ini akan mengarah pada upaya untuk menghilangkan atau memusuhi pihak lain yang dinilai negatif tersebut. Mereka yang berprasangka seperti mendapatkan justifikasi untuk berbuat tidak adil atau memusuhi pihak lain. Dalam sejarah telah tercatat bahwa kelompok-kelompok yang memiliki dan mendasarkan perilakunya pada prasangka sangat membahayakan kehidupan bersama. Mereka di antaranya, adalah kelompok Nazi dan Ku Klux Klan (Adorno, dkk., 1950). Di sini, keadilan lebih ditekankan pada keadilan relasional, bukan pada keadilan distributif yang menekankan pembagian sumber daya dan kekuasaan. Namun

sikap dan tindakan itu menunjukkan favoritisme pada kelompoknya dan sekaligus derogasi terhadap kelompok lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, prasangka dan ketidakadilan muncul dalam bentuk diskriminasi. Hampir di semua tatanan kehidupan diskriminasi tidak diperbolehkan, tetapi dalam praktik persoalan ini sangat banyak ditemukan. Dalam keluarga sekalipun, sikap dan tindak diskriminatif selalu ada. Dalam praktik bisnis dan birokrasi, perilaku ini dikenal dengan KKN. Banyak sekali variasi bentuknya, namun prinsipnya sama, yaitu favoritisme kelompok sendiri dan derogasi kelompok lain.

Tatkala konflik belum terjadi dan persoalan-persoalan tentang ketidakadilan dan prasangka dalam bentuk diskriminasi juga belum muncul, ada dinamika sosial psikologis yang mengarah ke konflik. Ada kecenderungan dalam diri manusia untuk memperkuat diri dan kelompoknya dalam hal identitas. Namun hal ini dapat berakibat pada konflik dengan kelompok lain. Dinamika-dinamika dalam kelompok itu dijelaskan di bawah ini.

Pertama, secara sosiobiologis ada semacam seleksi sehingga cara yang mudah dan alamiah untuk berkelompok adalah berdasarkan pada hubungan genetik. Keturunan dalam keluarga-keluarga membentuk komunitas. Perbedaan keturunan membentuk komunitas yang berbeda-beda. Hubungan kekerabatan terbentuk dan membawa konsekuensi pada aspek emosi dalam relasi sosial. Emosi-emosi positif berkembang dalam hubungan internal keluarga. Sebaliknya, dalam berhubungan dengan anggota keluarga atau kelompok lain, hal itu tidak muncul. Familiaritas dan kedekatan emosi inilah yang mendorong orang untuk lebih berorientasi pada keluarga atau secara lebih luas kepada kelompoknya.

Kedua, anggota kelompok-kelompok yang berbeda membentuk dan memperkuat identitas dengan cara identifikasi terhadap pemimpinnya. Tidak semua orang memiliki karakter dan kemampuan seperti pemimpin. Mereka yang tergolong pengikut ini memiliki kecenderungan untuk menuruti apa yang dikatakan atau diperbuat pemimpin. Salah satu teknik dalam memperkuat posisi diri seorang pimpinan adalah dengan cara memandang negatif atau bersikap bermusuhan dengan pemimpin dan kelompok lain. Sikap dan pandangan seperti ini cenderung diamini oleh pengikut. Meskipun secara individual para pengikut ini tidak punya masalah dengan kelompok lain, apabila pemimpinnya memusuhi kelompok lain, maka mereka mengikuti saja.

Ketiga, setiap individu perlu validasi diri tentang status dan kemampuannya. Cara yang paling mudah untuk melakukan validasi adalah dengan kelompoknya sendiri. Individu membandingkan dan berusaha untuk sama dengan kelompok. Bila tidak sama, maka kemampuan dan statusnya bisa dinilai tidak valid. Ketika hal ini terjadi, maka secara psikologis orang yang bersangkutan merasa sangat tidak nyaman. Setiap individu berusaha untuk memperoleh kenyamanan itu. Dengan menjadikan dirinya sama dengan kelompok, maka validasi tersebut tercapai. Pada tahap ini, sebenarnya belum muncul persoalan ke arah konflik. Persoalan mulai muncul tatkala homogenitas dalam kelompok ini menjadi kontras atau berbeda dengan kelompok lain.

Keempat, perbedaan dengan kelompok lain dapat dinetralisasi ketika ada upaya untuk bekerja sama. Motivasi bekerja sama ini menjadi bagian penting dalam mereduksi potensi konflik. Persoalannya, motivasi bekerja sama sering tidak menjadi dasar untuk melakukan hubungan sosial. Sebaliknya, dalam dunia yang

makin modern, kompetensi justru lebih sering mendasari hubungan tersebut. Ketika sumber daya terbatas, kompetisi sering mengarah pada konflik seperti yang dijelaskan terdahulu.

Kelima, ada kecenderungan dalam kelompok juga yang mengarah pada prasangka dan permusuhan yang disebabkan ketidaktahuan akan kelompok lain atau pandangan bahwa kelompok lain homogen. Dalam relasi antarkelompok, yang terjadi sesungguhnya adalah relasi antarindividu dari kelompok-kelompok yang berbeda. Individu sebagai representasi kelompok sering dianggap sama dengan kelompok secara keseluruhan. Dengan kata lain, kelompok lain sering dipandang oleh satu kelompok memiliki homogenitas yang tinggi, perbedaan-perbedaan individu di dalam kelompok lain itu dianggap tidak ada atau diminimalisasi. Ketika satu kelompok memberi atribut negatif kepada kelompok lain, maka semua anggota dalam kelompok tersebut negatif. Realitas ini adalah suatu kesalahan, tetapi persepsi ini adalah suatu keniscayaan. Lebih dari itu, hal ini bisa mendorong pada relasi yang konfliktual.

Masih banyak teori psikologi yang dapat menjelaskan dinamika kelompok dan dinamika relasi antarkelompok yang dapat digunakan untuk memahami konflik dan kekerasan, di antaranya, adalah teori frustrasi-agresi dan *scapegoating*. Namun bukan maksud tulisan ini untuk menginventarisasi dan menjelaskannya satu per satu. Masih ada pertanyaan yang lebih penting untuk dikaji, yaitu bagaimana memecahkan konflik?

Redefinisi Identitas Indonesia

Dalam bukunya berjudul *Imagined Communities*, Benedict Anderson (2001) menjelaskan bahwa secara sosial psikologis,

Indonesia belum terdefiniskan secara jelas. Kajian-kajian di atas sesungguhnya banyak menitikberatkan pada kerangka identitas sosial. Kenyataan memang menunjukkan bahwa secara sosial psikologis, identitas Indonesia pada masing-masing manusia Indonesia tidak seperti negara-bangsa yang ada, misalnya Jepang, Israel, atau negara-negara lain yang dilihat dari kebangsaannya lebih homogen. Hal ini telah terbukti menjadi salah satu penyebab dari konflik yang disebabkan oleh keinginan memisahkan diri pada wilayah-wilayah tertentu, seperti GPM di Papua Barat. Aneksasi Timor Timur juga gagal karena upaya untuk menyatukan identitas mereka menjadi satu identitas dengan Indonesia tidak berhasil. Sekarang justru mulai banyak yang menyadari bahwa selama ini memang identitas tersebut belum solid.

Pada sisi lain, pandangan bahwa belum adanya identitas juga tidak benar secara mutlak. Ada dua hal setidaknya yang digunakan untuk argumentasi di sini. *Pertama*, persoalan konflik yang mengarah pada separatisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara yang telah membangun dirinya lebih lama dan memiliki identitas yang membanggakan tidak lepas dari persoalan konflik dan berlanjut dengan separatisme. Uni Sovyet dan Yugoslavia adalah contohnya. Kedua negara tersebut juga bisa dijadikan contoh dari persoalan identitas yang belum selesai. Namun, bila dibandingkan dengan Indonesia, tahap persoalan identitas (dari dalam) dan citra (dari luar) lebih solid di sana daripada di sini.

Kedua, pluralitas dalam hal suku, agama, bahasa daerah, dan letak geografis di Indonesia sangat besar. Membangun identitas masyarakat yang demikian plural jauh lebih sulit dibandingkan dengan pada masyarakat yang relatif homogen. Ketika identitas tersebut dibangun, justru akan lebih kuat. Contoh untuk ini adalah

Amerika Serikat dan Australia. Dalam sejarahnya, AS adalah negara yang dibangun dengan pertumpahan darah yang luar biasa banyaknya. Indonesia berusaha membangun seperti itu, salah satunya adalah dengan Sumpah Pemuda. Namun harus diakui juga bahwa salah satu pendorong kuat dari munculnya Sumpah Pemuda pada waktu itu adalah faktor eksternal, yaitu penjajah dan pergerakan di negara-negara yang dijajah.

Ketiga, proses ke arah definisi yang dimaksud bukan suatu hal yang instan dan dapat dibentuk tanpa ada hambatan. Hampir satu abad upaya untuk memiliki identitas yang kuat telah dilakukan. Dari sisi waktu, ini mungkin sudah tergolong memadai, tetapi bila dilihat secara lebih seksama, perjalanan yang panjang itu mengalami periode pasang-surut. Di awal abad 20, muncul banyak pergerakan dan secara formal tahun 1908 diakui sebagai awal kebangkitan nasional. Dua puluh tahun sesudahnya perjuangan tersebut makin mengkristal dengan adanya Sumpah Pemuda. Puncak dari perjuangan terjadi 17 tahun berikutnya, yaitu saat kemerdekaan diproklamasikan. Bagi banyak negara, proklamasi merupakan tonggak penting untuk membangun diri, namun hal ini tidak terjadi di Indonesia. Dibutuhkan hampir 10 tahun untuk dapat diakui sebagai negara merdeka. Periode ini dapat dikatakan periode surut bukan dalam arti semangat untuk menjadi matang, tetapi dalam arti membangun jati diri. Tidak segeranya menata dan membangun diri pada periode ini menimbulkan disonansi psikologis secara kolektif. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan separatisme, seperti DI/TII, RMS, dan puncaknya adalah G30S/PKI.

Periode sesudah itu merupakan babak baru dari disonansi psikologis yang panjang, setidaknya lebih panjang dari periode

sebelumnya. Bila antara periode penting sebelumnya berkisar 20 tahunan (antara 1908, 1928, 1945, dan 1965), periode yang dimaksud ini lebih dari 30 tahun. Secara psikologis, periode-periode sebelumnya sebanding dengan waktu munculnya generasi muda baru. Dalam psikologi, dikenal periode penuh gejolak dalam perkembangan manusia, yaitu periode seumur generasi muda (sekitar 20 tahun). Pada setiap generasi, masa ini 'diperlukan' sebagai bagian untuk mematangkan diri. Secara kumulatif, kematangan pada setiap generasi akan membangun kematangan kolektif. Pemerintahan Orde Baru telah membuat setidaknya satu generasi yang seharusnya bisa menjadi matang justru tidak berkembang alias menjadi kerdil. Secara sistematis, hal itu tampak jelas sekali dengan diterapkannya sistem pemerintahan yang otoriter.

Dari uraian di atas tampak bahwa sesudah merdeka secara politis, bangsa ini tidak merdeka secara psikologis. Karenanya, proses pengembangan identitas tidak dapat berjalan lancar. Persoalan ini menjadi salah satu akar konflik yang ada sekaligus sumber munculnya kesulitan untuk resolusi konflik. Pemerintahan sesudah rezim Orde Baru di bawah Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati tampaknya juga belum mengusahakan kemerdekaan psikologis ini secara jelas dan tegas. Hal ini ditandai dengan pemihakan pemimpin-pemimpin itu pada kelompok atau partainya. Seharusnya pemimpin memberikan peluang kepada setiap individu dan kelompok untuk merdeka secara psikologis, bukan hanya memberikannya kepada kelompoknya yang dapat diartikan sebagai cara untuk menghambat kemerdekaan kelompok lain.

Penataan dan Pemecahan

Banyak prasyarat yang harus dipenuhi dan jalan yang harus ditempuh untuk membangun kembali kehidupan bersama dengan tingkat konflik yang minimal dan fungsional. Berdasarkan pada asumsi dan paparan dalam tulisan ini bahwa membangun keadilan dan identitas adalah kunci dari pemecahan konflik-konflik yang ada, beberapa ide berikut dapat dipertimbangkan untuk membangun kembali tata kehidupan bersama yang dimaksud. Pertama-tama perlu ditinjau dari sisi pengembangan identitas bersama yang lebih kuat dibandingkan dengan identitas sub-sub kelompok. Menguatnya identitas kelompok dibandingkan dengan identitas keindonesiaan tampak secara jelas dengan adanya atribut-atribut fisik. Secara fisik, memang ada atribut yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya warna kulit atau bentuk tubuh. Namun atribut fisik ini tidak selayaknya dikaitkan dengan atribut sosial psikologis, ekonomi, atau politik tertentu. Diskriminasi berdasarkan warna kulit sudah lama dilarang, namun dalam praktiknya diskriminasi masih muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Dwiyanto, dkk., 2003). Implikasi dari praktik-praktik diskriminasi yang dilakukan penyelenggara pemerintahan seperti itu sangat besar dalam menghambat pembangunan identitas bersama dan keadilan. Seharusnya secara kelembagaan mereka menciptakan situasi dan struktur untuk rekategorisasi ke arah identitas yang lebih luas, yaitu Indonesia.

Kedaaan yang demikian itu menuntut segera diwujudkannya lembaga pendukung atau lembaga yang justru mengendalikan praktik-praktik nondiskriminatori. Dalam ketatanegaraan, lembaga ini adalah lembaga hukum. Namun, kelembagaan dalam hal hukum

di Indonesia termasuk yang paling buruk kondisinya. Ada kecenderungan orang tidak lagi percaya dengan lembaga hukum. Untunglah masih ada lembaga-lembaga yang berperan untuk itu meskipun tidak bisa optimal karena peranan utamanya tidak untuk itu, misalnya lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga lintas agama. Bila pluralitas dapat diwadahi dan identitas keindonesiaan ingin ditingkatkan, maka salah satu langkah strategis adalah dengan mendorong lebih kuat lagi peran lembaga-lembaga ini.

Hukum dan peraturan merupakan panduan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta sanksi-sanksi yang menyertainya. Di masa-masa awal, upaya penyelesaian konflik memerlukan aturan yang melarang pemakaian atribut-atribut yang dapat memicu konflik. Salah satu contohnya adalah satuan tugas. Kebanyakan partai yang ada memiliki satuan tugas (Satgas). Terlepas dari tujuan semula yang ada unsur positifnya, perkembangan Satgas mengarah kepada kesiapan untuk 'berperang'. Munculnya 'front', 'komando', 'laskar', dan seterusnya yang merupakan atribut dari kelompok agama dan gerakan tertentu adalah bagian dari atribut kelompok yang juga menunjukkan kesiapan untuk menghadapi konflik dan menyelesaikannya melalui jalan kekerasan. Bentuk-bentuk atribut ini dapat dihapus bila lembaga yang menjaga ketenteraman dan keamanan hidup bersama berfungsi optimal. Munculnya isu bahwa aparat keamanan selama ini justru menjadi bagian dari pencipta rasa tidak aman dan pemicu konflik merupakan titik nadir dari persoalan konflik yang ada. Seharusnya mereka menjadi bagian penting dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pengembalian fungsi lembaga keamanan, seperti polisi dan tentara, dan penghapusan eksistensi 'tentara sipil' merupakan bagian integratif dari penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Masih banyak prasyarat penyelesaian konflik yang diperlukan sebelum penyelesaian terfokus pada konflik tersebut, di antaranya, adalah pemerintahan yang kuat. Sejauh ini ada indikasi bahwa pemerintah adalah bagian dari konflik, misalnya dalam kasus Aceh dan Papua. Berlarut-larutnya kasus itu disebabkan kurang kuatnya pemerintah. Pemerintah yang kuat tidak hanya diperlukan untuk menghapus gerakan separatisme, tetapi juga diperlukan untuk mengatasi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok di luar pemerintah. Makin besar konflik yang ada menuntut makin kuatnya posisi pemerintah, tetapi pemerintah yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi konflik yang berskala lebih kecil, bahkan untuk mencegah munculnya konflik. Salah satu cara untuk membangun pemerintahan yang kuat adalah melalui penerapan prinsip keadilan. Artinya, pemerintah yang dapat menegakkan dan menjalankan tugas dengan prinsip-prinsip keadilan tentu akan menjadi kuat.

Pemecahan konflik secara langsung selalu melalui proses yang panjang dan rumit, namun tidak berarti bahwa tidak ada jalan untuk menyelesaikan konflik. Akhir-akhir ini sudah banyak cara untuk menanganinya, bahkan manajemen konflik menjadi bidang yang sangat pesat berkembang. Di antaranya adalah melalui negosiasi yang adil saat pihak-pihak yang terlibat maupun pihak ketiga berunding dengan berdasarkan dan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu, pemecahan konflik juga perlu didasarkan pada diagnosis konflik. Pada kesempatan ini, pemecahan yang dimaksud baru pada tahap diagnosis konflik yang akan berguna pada pemecahan selanjutnya. Menurut Lewicki, dkk. (1999), diagnosis konflik akan mengarah pada kesimpulan tentang tingkat kesulitan pemecahan. Ada beberapa dimensi konflik yang dapat dijadikan bagian untuk mendiagnosis seperti diuraikan berikut ini.

Pertama adalah isu dari konflik tersebut. Konflik yang menyangkut nilai-nilai dan etika cenderung sulit dipecahkan. Sementara itu, isu-isu yang dapat dibagi (*divisible*) menjadi beberapa bagian akan lebih mudah diselesaikan.

Kedua adalah signifikansi konsekuensi. Ada konflik yang menyebabkan konsekuensi besar dan ada yang dampaknya relatif kecil. Makin besar konsekuensi dari konflik akan menyebabkan makin sulitnya pemecahan.

Ketiga adalah interdependensi pihak-pihak yang terlibat. Ketika konflik mengarah pada *zero sum*, maka akan sulit dipecahkan. Sebaliknya, bila masing-masing pihak masih dapat menerima posisi yang lain dan persoalan distribusi yang menyebabkan konflik dapat dinegosiasikan, maka pemecahan konflik menjadi keniscayaan yang lebih mudah diwujudkan.

Keempat adalah kelangsungan interaksi pihak-pihak yang bertikai. Ada konflik yang terjadi karena sekali berinteraksi sehingga sepertinya tidak ada masa lalu dan masa depan dari interaksi itu. Konflik seperti ini akan menjadi sulit didiagnosis dan diupayakan pemecahannya secara relatif permanen. Artinya, pemecahan hanya didasarkan pada kasus per kasus.

Kelima adalah struktur dari masing-masing pihak yang terlibat. Semakin kohesif organisasi yang terlibat konflik, semakin mudah mengajak pihak ini memecahkan konflik.

Keenam adalah keterlibatan pihak ketiga. Bila pihak ketiga yang netral tidak ada, maka akan sulit memecahkan konflik antara dua pihak. Sebaliknya, bila ada pihak ketiga dapat dipercaya dan memiliki

kekuasaan yang besar, maka keterlibatannya akan mempercepat penyelesaian.

Ketujuh adalah penilaian akan kemajuan konflik. Maksudnya, bila ada pihak yang merasa lebih menderita, banyak korban, atau dirugikan dibandingkan dengan pihak lain, maka penyelesaiannya akan lebih berlarut-larut. Sebaliknya, bila pihak-pihak yang terlibat menderita dan mendapat 'kemenangan' secara ekual, maka mereka akan lebih mudah diajak berunding.

Beberapa dimensi yang diuraikan di atas diharapkan dapat melengkapi uraian sebelumnya dalam rangka memahami maupun mengupayakan penyelesaiannya. Tentu saja dibutuhkan referensi lain dalam mengkaji konflik sehingga dari artikel lain dalam buku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tulisan ini.

Penutup

Konflik yang terjadi sesungguhnya merupakan hal yang melelahkan, bahkan bagi orang yang sekadar mendengarnya. Namun, kelelahan itu sering diatasi dengan mencari energi baru dengan jalan memusuhi pihak lain. Pada sisi lain, banyak cara untuk mendapatkan energi baru dan menggunakannya untuk membangun ke arah yang positif. Persoalannya, begitu terlibat dalam konflik sepertinya tidak ada lagi jalan untuk kembali dan menyelesaikannya, terlebih ketika pihak-pihak yang terlibat makin banyak termasuk pihak-pihak yang seharusnya menangani konflik, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga nonpemerintah. Dalam kondisi yang demikian seharusnya masih ada sedikit kearifan yang dipelajari dan dipetik. Dalam mitos-mitos dan juga sejarah perang selalu ada kearifan di baliknya, misalnya ketika Pandawa merawat Bisma yang sekarat

akibat panah-panah Arjuna dan tentara Pandawa. Hal seperti itupun sesungguhnya tidak ideal sama sekali, namun masih lebih baik daripada memenggal kepala sesama anak bangsa dan mempertontonkannya dengan rasa bangga. Di sinilah pentingnya mencari titik untuk berhenti berkonflik. Ketika titik itu belum ditemukan, sulit berharap penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan.

Referensi

- Adorno, T. W., Frenkel-Brunswick, E., Levinson, D. J. and Sanford, R. N. 1950. *The Authoritarian Personality*. New York: Harper & Row.
- Anderson, B. 2001. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Insist Press.
- Brewer, M. and Milner, N. 1996. *Intergroup Relations*. Buckingham: Open University Press.
- Colombijn, F. and Lindbald, J. T. 2002. *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Faturochman. 1993a. "Prejudice and hostility: some perspectives" *Buletin Psikologi*, 1(1): 17-23.
- . 1993b. "Perang kecil: problem yang terus berlangsung" *Buletin Psikologi*, 1(2): 6-12.
- . 1995. "Penilaian dan reaksi terhadap pembagian upah" *Jurnal Psikologi*, 22(2): 36-48.
- . 1998. "Deprivasi relatif: rasa keadilan dan kondisi buruh pabrik" *Jurnal Psikologi*, 25(2): 1-15.
- . 1999a. "Keadilan sosial" *Buletin Psikologi*, 7(1): 13-27.
- . 1999b. "Collective behaviour and intergroup aggression" *Buletin Psikologi*, 7(2): 1-6.

- . 1999c. "Krisis dan nasib buruh di pedesaan" *Populasi*, 10(1): 27-42.
- . 2002b. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: UPF Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar.
- Faturochman dan Bimo Walgito. 2002a. "Ketidakberdayaan pemilik sawah dan ketidakadilan terhadap mereka: kasus penanaman tembakau di Klaten" *Populasi*, 13(1): 67-92.
- Faturochman dan Djamaludin Ancok. 2001. "Dinamika psikologis penilaian keadilan" *Jurnal Psikologi*, 28(1): 41-60.
- Faturochman dan Saparinah Sadli. 2003. "Gender dan penilaian keadilan" *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2): 95-104.
- Greenberg, J. 1996. *The Quest for Justice on the Jobs*. London: Sage.
- Lewicki, R. J., D. M. Saunders and J. W. Minton. 1999. *Negotiation*. 3rd edition. Boston: McGraw-Hill.
- Oakes, P. J., S. A. Haslam and J. C. Turner. 1994. *Stereotyping and Social Reality*. Oxford: Blackwell.
- Miall, H., O. Ramsbotham, and Woodhouse. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Van Den Bos, K. 1996. *Procedural Justice and Conflict*. Leiden: Leiden University.
- Wetherell. M. 1996. *Identities, Groups and Social Issues*. London: Open University.